

**PROSES PEMBUATAN PERATURAN DESA OLEH BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DI DESA
BURANGKENG KECAMATAN SETU KABUPATEN BEKASI**

S K R I P S I

Di ajukan dalam rangka memenuhi Ujian sarjana Strata Satu
Program studi Ilmu Pemerintahan



**WAHYU AGIS MAULANA
NIM : 41183506170046**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM "45" BEKASI
2024**

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PERSETUJUAN

Judul : Proses Pembuatan Peraturan Desa oleh Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Burangkeng
Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi".

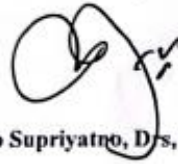
Penyusun : Wahyu Agis Maulana

NPM : 41183506170046

Bekasi, 26 Juli 2024

Menyetujui:

Pembimbing



Yanto Supriatno, D/s, M.Si

Mengetahui:

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan


Muhammad Fadil, S.Ip, M.Si

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI SKRIPSI

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI SKRIPSI

Proses Pembuatan Peraturan Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di
Desa Burangkeng Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi



Dipersiapkan dan disusun oleh:

Wahyu Agis Maulana

41183506170046

Telah diujikan dihadapan Dewan Penguji

Pada Tanggal : 26 Juli 2024

Dan telah dinyatakan Lulus/ Disahkan :

di Universitas Islam 45 Bekasi

Pada Tanggal: 26 Juli 2024

Dewan Penguji :

Ketua	: Muhammad fadil, S.Ip., M.Si	(.....)
Sekretaris	: Elvira Suryani, S.Ip., M.Si	(.....)
Anggota	: 1. Yanto Supriyatno, Drs., M.Si	(.....)
	: 2. Ainur Rofieq, S.Ip., M.Ip	(.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS

PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Wahyu Agis Maulana

NPM : 41183506170046

Tanda Tangan



Ditetapkan di : Bekasi

Tanggal : 26 Juli 2024

ABSTRAK

Skripsi ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana proses pembuatan peraturan desa oleh BPD di Desa Burangkeng Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi, yang melatarbelakangi bahwa masih ada permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam proses pembuatan peraturan desa. Permasalahan tersebut diduga karena kurang berperannya BPD dalam proses pembuatan peraturan desa. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut penulis menulis judul skripsi : Proses Pembuatan Peraturan Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Burangkeng Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi.

Tujuan dan kegunaan penelitian ini untuk mengidentifikasi proses pembuatan peraturan desa oleh BPD dalam di Desa Burangkeng Kecamatan Setu. Sedangkan Kegunaan dalam penelitian ini sebagai bentuk pembelajaran bagi peneliti dalam bentuk pengimplementasian teori dalam bentuk pengamatan, wawancara dan tanya jawab yang dilakukan dilapangan.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif, dimana penelitian kualitatif yaitu memaparkan atau menggambarkan semua peristiwa penelitian yang diperoleh dari lapangan sesuai dengan perumusan masalah. Penelitian ini menggunakan satu variabel sehingga kedalaman analisis lebih menekankan pada hasil temuan data lapangan baik data primer maupun data sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Proses pembuatan peraturan desa oleh BPD dalam di Desa Burangkeng Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi menunjukkan nilai prosentase sebesar 76,52% berada dalam kategori baik. Hasil ini diperoleh dari berbagai aspek-aspek yang ada dalam indikator-indikator seperti indikator Berpedoman pada kebijaksanaan yang berlaku adalah 81,30 % berada pada kategori sangat baik, indicator tidak bertentangan dengan kebijakan yang ada adalah 74,40% berada pada kategori baik, indicator berorientasi kemasa depan adalah 79,20% berada pada kategori baik, indicator berorientasi pada kepentingan umum adalah 72,70% berada pada kategori baik dan indicator Jelas, tepat, dan tidak menimbulkan kekaburan adalah 74,60% berada pada kategori baik.

Dalam proses pembuatan peraturan desa oleh BPD ada beberapa hambatan-hambatan yaitu: Kemampuan yang tidak memadai dari anggota BPD dalam penggunaan teknologi, Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang dimiliki BPD Desa Burangkeng, Kurangnya kemampuan atau skill yang dimiliki anggota BPD, Kurangnya kultur dan budaya yang dimiliki anggota BPD dan tidak ada alokasi anggaran yang disediakan Pemdes Burangkeng. Sedangkan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan adalah : Sebaiknya sarana teknologi yang dimiliki oleh ketua BPD dan kepala desa harus diperbanyak dan diperluas, Sumber daya manusia (SDM) ditingkatkan kemampuannya dan diikuti niat yang sungguh-sungguh, Pengetahuan dan pengalaman Anggota BPD yang dimiliki harus sesuai dengan apa yang diharapkan, Pengalaman Anggota BPD yang kurang harus diperbaiki dan Pendanaan harus disiapkan oleh Pemerintah Desa.

Kata Kunci : Peraturan Desa, BPD dan Pemerintah Desa

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi :

Nama : Wahyu Agis Maulana
Tempat Tanggal Lahir : Bekasi, 25 Agustus 1997
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Kp. Burangkeng Rt 001/006 Ds. Burangkeng Kec
Setu Kab. Bekasi

Data Keluarga :

Nama Ayah : Ucu Sukandar
Nama Ibu : Runasah

Riwayat Pendidikan:

TK : Lulus Tahun
SD : Lulus Tahun 2009
SMP : Lulus Tahun 2012
SMA : Lulus Tahun 2015

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan atas berkat dan karunia Allah SWT karena penulis diberikan kesehatan, waktu, pikiran dan kekuatan mental sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dengan judul “Proses Pembuatan Peraturan Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Burangkeng Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi”. Skripsi ini di susun untuk diajukan sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian untuk Strata Satu (S1) pada Program Studi Ilmu Pemerintahan di Universitas Islam 45 Bekasi.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu dalam penyelesaian skripsi ini, dengan secara khusus penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Yanto Supriyatno, Drs, M.Si, selaku dosen pembimbing dan Dekan FISIP UNISMA Bekasi, yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan kritik dan saran selama penelitian dan penyusunan skripsi ini sehingga dapat diselesaikan dengan baik.
2. Bapak Muhammad Fadil, S.Ip., M.Si, selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam 45 Bekasi.
3. Bapak Ketua BPD dan Kepala Desa Burangkeng Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi Staf, yang telah memberikan kesempatan meneliti dalam penulisan skripsi ini.
4. Kedua orang tua dan kakak-kakak saya, yang telah banyak memberikan dukungan baik secara moril maupun secara materil sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Teman-teman IP Angkatan 2017 yang telah banyak memberikan dorongan semangat selama kita 4 tahun berkuliah.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Saran dan kritik sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa mendatang. Penulis berharap semoga skripsi ini berguna dan membawa manfaat bagi kita semua.

Bekasi, Juli 2024

Penulis

Wahyu Agis Maulana

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
ABSTRAK	iv
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Kegunaan Penelitian	8
1.5 Signifikansi Penelitian	9
1.6 Sistematika Penulisan	14
BAB II KERANGKA TEORI	16
2.1 Pengertian Peranan	16
2.2 Badan Permusyawaratan Desa	17
2.3 Peraturan Desa	19
2.4 Proses Pembuatan Peraturan Desa	21
2.5 Kerangka Pemikiran	25
2.6 Definisi Operasional	30
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	34
3.1 Metode Penelitian	34
3.2 Teknik pengumpulan data	35

3.3 Populasi dan Sampel	36
3.4 Lokasi Dan Lamanya Penelitian	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
4.1 Gambaran Umum Kabupaten Bekasi.....	43
4.2 Gambaran Umum Desa Burangkeng	44
4.3 Gambaran Umum Pemerintahan Desa Burangkeng	50
4.4 Proses Pembuatan Peraturan Desa oleh Badan Permasyarakatan Desa (BPD) di Desa Burangkeng Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi	62
4.5 Hambatan-Hambatan yang Dihadapi Dalam Proses Pembuatan Peraturan Desa	90
4.6 Upaya-Upaya Yang Dilakukan Dalam Mengatasi Hambatan Dalam Pembuatan Peraturan Desa	91
BAB V PENUTUP	93
5.1 Simpulan	93
5.2 Saran.....	94
DAFTAR PUSTAKA	96
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Peraturan Desa yang dihasilkan BPD bersama Kepala Desa	5
Tabel 1.2 Dokumen Rapat Musyawarah Desa (MUSDES) Desa Burangkeng Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi tahun Anggaran 2022-2023	6
Tabel 3.1 Populasi Penelitian	37
Tabel 3.2 Populasi dan sampel	38
Tabel 3.3 Jadwal Penelitian	39
Tabel 4.1 Luas Wilayah dan Jumlah Desa	42
Tabel 4.2 Luas Wilayah Desa Burangkeng Menurut Penggunaannya	44
Tabel 4.3 Komposisi Penduduk Desa Burangkeng Menurut Usia	50
Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan	50
Tabel 4.5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama	51
Tabel 4.6 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian	51
Tabel 4.7 Sarana Perbelanjaan	52
Tabel 4.8 Sarana Kesehatan	53
Tabel 4.9 Sarana Pendidikan	53
Tabel 4.10 Sarana Olah Raga	54
Tabel 4.11 Sarana Ibadah	54
Tabel 4.12 Susunan Perangkat Desa Burangkeng	62
Tabel 4.13 Perlengkapan Perangkat Desa Burangkeng	63
Tabel 4.14 Nama-Nama Anggota BPD Desa Burangkeng	64
Tabel 4.15 Surat Keputusan yang dihasilkan BPD Desa Burangkeng.....	65
Tabel 4.16 Program Kerja Desa Burangkeng Tahun 2017	66
Tabel 4.17 Tanggapan Responden Mengenai Pembuatan Peraturan	

Desa Sesuai dengan.....	71
Tabel 4.18 Tanggapan Responden Mengenai Adanya Sosialisasi Kebijakan dalam Proses Pembuatan Peraturan Desa	73
Tabel 4.19 Tanggapan Responden Tentang Mengenai Evaluasi BPD terhadap Peraturan Desa yang Masih Berlaku	74
Tabel 4.20 Tanggapan Responden Mengenai Adanya Laporan Rapat dalam Pembuatan Peraturan Desa	76
Tabel 4.21 Tanggapan Responden Mengenai yang dibuat tidak Bertentangan dengan peraturan lain	78
Tabel 4.22 Tanggapan Responden Mengenai Kajian Akademis digunakan dalam Pembuatan Peraturan Desa	80
Tabel 4.23 Tanggapan Responden Tentang adanya Analisis Filosofis, Sosiologis dan Yuridis dalam Pembuatan Peraturan Desa ...	82
Tabel 4.24 Tanggapan Responden Mengenai Perumusan Peraturan Desa Didasari Aspirasi Masyarakat	84
Tabel 4.25 Tanggapan Responden Mengenai Pembuatan Peraturan Desa Didasari Kebutuhan Masyarakat	86
Tabel 4.26 Tanggapan Responden Mengenai Sosialisasi Pembuatan Peraturan Desa	88
Tabel 4.27 Tanggapan Responden Tentang Peraturan Desa Berdasarkan Skala Prioritas Kebutuhan Pemerintah Desa dan Masyarakat	90
Tabel 4.28 Tanggapan Responden Mengenai Pembuatan Peraturan Desa berdasarkan Jajak Pendapat Masyarakat	91
Tabel 4.29 Tanggapan Responden Mengenai Adanya Sosialisasi dan Evaluasi dalam Proses Pembuatan Peraturan Desa	93
Tabel 4.30 Tanggapan Responden Mengenai Proses Pembuatan Peraturan desa berdasarkan undang-undang yang berlaku	95
Tabel 4.31 Tanggapan Responden Mengenai Diskusi pada Awal Rapat	

	Perumusan Peraturan Desa	97
Tabel 4.32	Tanggapan Responden Mengenai Adanya Diskusi yang Melibatkan Para Ahli, Akademisi dan Konsultan	98
Tabel 4.33	Tanggapan Responden Isi Kebijakan didasarkan pada kritik dan masukan serta aspirasi bersama (BPD, Aparatur Pemerintahan, Unsur Masyarakat).	100
Tabel 4.34	Rekapitulasi Tanggapan Responden Peran BPD dalam pembuatan Peraturan Desa di Desa Burangkeng Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi	

DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Proses Pembuatan Peraturan Desa
oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa
Burangkeng Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi
29
2. Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Burangkeng ... 55